

## ***Reformasi Pendidikan Islam Di Pakistan: Ketegangan Antara Konservatisme Agama Dan Tuntutan Global***

**<sup>1</sup>Melda Delvia, <sup>2</sup>Dede Rosyada, <sup>3</sup>Muhammad Zalnur, <sup>4</sup>Titi Sartini, <sup>5</sup>Elijonnahdi**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Yasni Bungo, Indonesia

<sup>5</sup>STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, Indonesia

Email: [meldadelvia560@gmail.com](mailto:meldadelvia560@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to provide a comprehensive analysis of the dual structure of Islamic education in Pakistan, encompassing formal education integrated into the national system through the Islamiyat curriculum and traditional education conducted in madrasas based on the classical Dars-e-Nizami syllabus. The research focuses on examining the relationship between government educational policies, the dynamics of traditional madrasas, and the challenges of integrating Islamic values with the demands of modernity. A qualitative descriptive approach was employed through an extensive literature review of official documents, scholarly articles, and publications from international organizations. The findings reveal that reforms such as the Single National Curriculum (SNC) and madrasa regulation represent significant policy initiatives; however, their implementation is hindered by ideological resistance, structural constraints, and the lack of participatory approaches. Islamic education in Pakistan remains in tension between religious conservatism and global imperatives, highlighting the need for inclusive, transformative policies built on multi-stakeholder collaboration. These findings have implications for the development of adaptive, moderate, and contextually relevant models of Islamic education in other Muslim-majority countries.*

***Keywords:*** *Islamic Education, Pakistan, Religious Conservatism, Global Demands*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif dualisme sistem pendidikan Islam di Pakistan, yang mencakup pendidikan formal terintegrasi melalui mata pelajaran *Islamiyat* dan pendidikan tradisional berbasis madrasah dengan kurikulum *Dars-e-Nizami*. Fokus kajian diarahkan pada relasi antara kebijakan pemerintah, dinamika madrasah tradisional, dan tantangan integrasi nilai keislaman dengan tuntutan modernitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis kritis terhadap dokumen resmi, artikel ilmiah, dan publikasi lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi seperti *Single National Curriculum* (SNC) dan regulasi madrasah merupakan langkah strategis, namun implementasinya terhambat oleh resistensi ideologis, hambatan struktural, dan keterbatasan pendekatan partisipatif. Pendidikan Islam di Pakistan masih berada dalam ketegangan antara konservatisme agama dan tuntutan global, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif, transformatif, dan berbasis kolaborasi multipihak. Temuan ini berimplikasi pada perumusan model pengembangan pendidikan Islam yang adaptif, moderat, dan relevan bagi negara-negara Muslim lainnya.

***Kata Kunci:*** *Pendidikan Islam, Pakistan, Konservatisme Agama, Tuntutan Global*

## A. Pendahuluan

Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki kekhasan dalam mengembangkan pendidikan Islam<sup>1</sup>. Berdiri sejak tahun 1947 atas dasar ideologi Islam, negara ini menjadikan agama sebagai fondasi konstitusional, kultural, dan sosial-politik<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2024 dan sekitar 97% di antaranya beragama Islam, pendidikan agama menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan publik dan sistem pendidikan nasional<sup>3</sup>. Secara geografis, budaya, dan historis, Pakistan menempati posisi strategis yang memungkinkan pertukaran gagasan Islam dari berbagai mazhab dan tradisi, termasuk *Deobandi*, *Barelvi*, *Ahl-e-Hadith*, dan *Syiah*<sup>4</sup>. Konteks ini menciptakan kompleksitas dalam desain dan pelaksanaan pendidikan Islam di negara tersebut.

Dalam literatur, sistem pendidikan Islam di Pakistan dikenal dengan struktur yang dualistik dimana pendidikan formal (*Islamiyat* dalam kurikulum nasional) dan pendidikan tradisional (*madrasah*) yang masih mempertahankan kurikulum *Dars-e-Nizami*. Pendidikan Islam formal ditawarkan hingga jenjang perguruan tinggi dengan pendekatan akademik, sementara madrasah berfokus pada pelestarian ilmu klasik Islam seperti tafsir, hadis, dan fiqh<sup>5</sup>. Pemerintah Pakistan telah melakukan berbagai reformasi seperti peluncuran *Single National Curriculum* (SNC) dan pendirian lembaga pengawasan madrasah. Namun, kebijakan ini masih menghadapi resistensi dari kelompok ulama, perbedaan ideologis, serta keterbatasan sumber daya<sup>6</sup>.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai sejarah dan struktur pendidikan Islam di Pakistan, masih minim kajian yang secara holistik menganalisis relasi antara kebijakan pendidikan pemerintah, dinamika madrasah tradisional, serta tantangan integrasi nilai keislaman dengan tuntutan modernitas dan globalisasi. Mayoritas kajian terdahulu lebih menekankan pada aspek normatif atau struktural, belum banyak yang menyoroti secara kritis bagaimana pendidikan Islam di Pakistan mencerminkan pergulatan antara konservatisme agama, politik negara, dan kebutuhan reformasi pendidikan dalam konteks kontemporer.

---

<sup>1</sup> Nurul Widiyah Lubis and Rindi Antika Sari Saragih, 'Sistem Pendidikan Negara-Negara Di Asia (India, Pakistan, Bangladesh, Dan Maroko)', *RAZIQA: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023): 119–25.

<sup>2</sup> Tadzkira Nadiya Tsauri, 'Pengaruh Pemikiran Muhammad Asad Dalam Pembentukan Negara Islam: Studi Tentang Terbentuknya Negara Pakistan' (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>3</sup> Budi Darmawan and Endah Regita Cahyani Nazra, 'Lahirnya Pakistan: Perjuangan Muslim India Dan Tantangan Pembangunan Bangsa', *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 18, no. 2 (2024): 242–59.

<sup>4</sup> Rusdi Hamka Lubis, 'Critic: Poverty in Indonesia and the Solution of Islam in the Welfare of the People's Economy', *Academia Edu*, 2020..

<sup>5</sup> Samdani Samdani, 'Perkembangan dan Pendidikan Islam di Pakistan', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2021): 44–57.

<sup>6</sup> Komarudin Sassi, 'Wawasan Politik-Ideologis Pendidikan Islam Di Pakistan Dan Iran: Integrasi Doktrin Sunni-Syi'ah', *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 3, no. 01 (2025): 468–80.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem pendidikan Islam di Pakistan dengan menyoroti gambaran umum tentang Pakistan, perkembangan Islam di Pakistan, sistem pendidikan Islam di Pakistan, serta kebijakan pemerintah Pakistan terhadap pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang pengembangan pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual di negara dengan basis ideologi Islam yang kuat.

Urgensi kajian ini terletak pada pentingnya memahami model pendidikan Islam yang mampu menjembatani nilai-nilai religius dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti *radikalisme*, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan literasi keagamaan yang moderat. Selain itu, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, yang tengah menghadapi persoalan serupa dalam upaya mengintegrasikan nilai Islam dengan pendidikan nasional yang *inklusif* dan berkualitas.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan metode studi kepustakaan (*library research*)<sup>7</sup>. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam di Pakistan secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan memahami fenomena pendidikan Islam dalam aspek historis, struktural, dan kebijakan secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi negara Pakistan seperti konstitusi, kebijakan pendidikan nasional seperti *Single National Curriculum*, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas pendidikan Islam, madrasah, dan reformasi pendidikan di Pakistan. Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, laporan hasil penelitian sebelumnya, serta publikasi lembaga internasional yang relevan seperti UNESCO dan *United Nations*<sup>8</sup>.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara sistematis terhadap referensi-referensi yang ditemukan dalam jurnal terakreditasi, buku ilmiah, dan dokumen kebijakan publik<sup>9</sup>. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan penafsiran

---

<sup>7</sup> Miza Nina Adlini et al., 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.

<sup>8</sup> Bahrum Subagiya, 'Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis', *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 304–18.

<sup>9</sup> Muhammad Irfan Syahroni, 'Prosedur Penelitian Kuantitatif', *EJurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (2022): 43–56.

data. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus kajian, yaitu sistem pendidikan formal dan pendidikan madrasah di Pakistan. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikategorisasikan ke dalam tema-tema utama seperti kurikulum *Islamiyat*, madrasah tradisional, peran negara, dan kebijakan reformasi. Tahap akhir adalah penafsiran, yakni menyusun pemahaman yang bersifat kritis dan reflektif terhadap dinamika pendidikan Islam di Pakistan, terutama dalam konteks relasi antara agama, negara, dan modernitas<sup>10</sup>.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi berbeda, baik dari sumber akademik, kebijakan resmi, maupun publikasi lembaga internasional. *Triangulasi* ini penting agar analisis yang dihasilkan tidak bersifat *parsial* atau bias<sup>11</sup>. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang objektif, tajam, dan *komprehensif* mengenai perkembangan dan tantangan pendidikan Islam di Pakistan dalam menghadapi tuntutan global serta perubahan sosial keagamaan di era kontemporer.

## C. Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pakistan

Pakistan secara resmi bernama *Islamic Republic of Pakistan* pada tanggal 14 Agustus 1947. Pakistan merupakan sebuah negara di kawasan Asia Selatan yang memiliki posisi geografis strategis dengan luas  $\pm 796.095 \text{ Km}^2$ <sup>12</sup>. Pakistan merupakan negara terluas ke 36 di dunia. Letaknya yang berbatasan langsung dengan empat negara, yaitu India dan Cina di sebelah timur, Afghanistan dan Iran di barat, serta Tiongkok di utara, menjadikan Pakistan sebagai titik pertemuan penting antara Asia Tengah dan Asia Selatan. Di bagian selatan, Pakistan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.000 km yang berbatasan langsung dengan Laut Arab, memberikan keuntungan tersendiri dalam hal perdagangan maritim, dan dengan Uni Soviet disebelah utara<sup>13</sup>. Negara ini terdiri dari empat provinsi utama yaitu Balochistan, Punjab, Sindh, *North West Frontier Province* (NWFP) dan Islamabad. Islamabad, sebagai ibu kota negara, terletak di bagian timur laut

---

<sup>10</sup> Yuli Asmi Rozali, 'Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik', in *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, vol. 19, 2022, 68.

<sup>11</sup> Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (24 December 2022): 54–64, <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.

<sup>12</sup> 'Pakistan', in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 13 January 2025.

<sup>13</sup> Muslem Muslem, 'Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Di Pakistan', *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2019).

dan dirancang secara modern, sedangkan Karachi di Provinsi Sindh merupakan kota terbesar, pusat ekonomi, pelabuhan utama, dan pusat keuangan nasional<sup>14</sup>.

Secara demografis menurut data dari laporan *World Population Prospects 2024* United Nations, pada tahun 2024 jumlah penduduk Pakistan mencapai 251,26 juta jiwa, menjadikannya negara berpenduduk terbesar kelima di dunia<sup>15</sup>. Komposisi etnis Pakistan sangat beragam, terdiri atas etnis Punjabi, Sindhi, Pashtun, Baloch, Muhajir (keturunan migran dari India pasca-partisi), dan beberapa kelompok minoritas lainnya. Bahasa Urdu dijadikan bahasa nasional dan simbol identitas persatuan, meskipun bukan bahasa ibu mayoritas. Bahasa Inggris banyak digunakan dalam bidang pemerintahan, hukum, pendidikan tinggi, dan bisnis, menjadikannya sebagai bahasa resmi kedua. Selain itu, setiap provinsi memiliki bahasa daerah dominan, seperti Punjabi di Punjab, Sindhi di Sindh, dan Pashto di Khyber Pakhtunkhwa<sup>16</sup>.

Secara pemerintahan, Pakistan menganut sistem republik federal parlementer. Kepala negara adalah presiden yang memiliki peran *seremonial*, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif terdiri dari dua, yaitu Majelis Nasional (*National Assembly*) dan Senat. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh mahkamah agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Struktur federal memungkinkan provinsi memiliki kewenangan dalam bidang-bidang tertentu, namun pemerintahan pusat tetap memiliki kendali dalam isu-isu strategis nasional<sup>17</sup>.

Dalam bidang ekonomi, Pakistan memiliki perekonomian campuran yang mencakup sektor pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian menyumbang sekitar 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan lebih dari 40% tenaga kerja nasional. Komoditas utama meliputi gandum, beras, kapas, dan tebu. Industri tekstil merupakan penyumbang ekspor terbesar, diikuti oleh industri kulit, semen, pupuk, dan barang elektronik. Namun, ekonomi Pakistan menghadapi tantangan serius, seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran, ketergantungan pada impor energi, serta hutang luar negeri yang besar. Pemerintah sering kali mengandalkan bantuan keuangan dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan bank dunia. Dalam beberapa

---

<sup>14</sup> Samdani Samdani, 'Pendidikan Islam Di Pakistan', *Educational Journal: General and Specific Research* 1, no. 1 (2021): 1–14.

<sup>15</sup> United Nations, *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. UN DESA/POP/2024/TR/NO. 9 (New York: United Nations Publication, 2024).

<sup>16</sup> Nashruddin Atta, 'Pendidikan Islam Di Pakistan: Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia', *FIKRUNA* 3, no. 2 (2021): 75–87.

<sup>17</sup> Muslem, 'Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Di Pakistan'.

tahun terakhir, proyek-proyek infrastruktur besar seperti *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) menjadi tulang punggung strategi pembangunan nasional.

Dalam aspek sosial dan keagamaan, Pakistan adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, sekitar 97% dari total populasi, dengan mayoritas beraliran Sunni dan sekitar 10–15% Syiah. Agama Islam memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial. Namun, terdapat pula komunitas minoritas non muslim seperti Kristen, Hindu, Sikh, dan Ahmadiyah, yang meskipun dijamin hak-haknya dalam konstitusi, namun sering menghadapi diskriminasi dalam praktiknya. Sistem pendidikan Pakistan terbagi atas jalur umum dan jalur madrasah (pendidikan Islam), dengan tantangan utama seperti rendahnya angka melek huruf di pedesaan, kesenjangan gender dalam akses pendidikan, dan ketimpangan kualitas antar wilayah<sup>18</sup>.

Dari sisi kebudayaan, Pakistan memiliki warisan budaya yang sangat kaya, yang dipengaruhi oleh peradaban kuno Lembah Indus, budaya Persia, Islam, dan warisan India. Musik tradisional seperti Qawwali, Ghazal, dan musik rakyat daerah masih lestari dan berkembang. Seni arsitektur Islam seperti masjid Badshahi dan benteng Lahore menunjukkan kejayaan budaya Mughal yang kuat. Makanan Pakistan dikenal dengan cita rasa rempah-rempah yang kaya, dengan hidangan khas seperti biryani, nihari, dan roti naan. Busana tradisional seperti shalwar kameez digunakan secara luas dan menjadi simbol identitas nasional. Selain itu, olahraga kriket menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, bahkan menjadi alat diplomasi lunak dalam hubungan dengan negara-negara lain<sup>19</sup>.

Secara geopolitik, Pakistan merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Persemakmuran, dan memiliki hubungan strategis dengan Tiongkok, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk. Namun, hubungan dengan negara tetangga India dan Afghanistan cenderung tegang dan penuh ketidakpastian. Stabilitas keamanan dalam negeri juga masih menjadi tantangan akibat konflik sektarian, ekstremisme agama, dan militansi di daerah perbatasan. Meski demikian, Pakistan memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kekuatan regional jika mampu mengelola sumber daya alamnya, memajukan pendidikan, memberantas korupsi, dan meningkatkan stabilitas politik<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Yesi Arikarani, 'Pendidikan Islam Di Mesir, India, Dan Pakistan', *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2019): 87–112, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.76>.

<sup>19</sup> Samdani, 'Pendidikan Islam Di Pakistan'.

<sup>20</sup> Surawardi Surawardi, 'Pendidikan Islam Di Pakistan', *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015).

## 2. Integrasi Islam dalam Struktur Kenegaraan dan Kehidupan Sosial Pakistan

Islam di Pakistan merupakan elemen utama dalam pembentukan identitas nasional, sistem pemerintahan, kehidupan sosial-budaya, hingga kebijakan publik. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan secara eksplisit didirikan sebagai negara bagi umat Islam di anak benua India, menyusul partisi India Britania. Gerakan yang dikenal dengan nama *Two Nation Theory* menyatakan bahwa muslim dan hindu adalah dua komunitas bangsa yang berbeda secara fundamental dalam hal agama, budaya, dan nilai-nilai kehidupan, sehingga tidak dapat hidup bersama dalam satu negara. Muhammad Ali Jinnah, pemimpin liga muslim dan bapak pendiri Pakistan, memperjuangkan visi sebuah negara muslim yang tidak hanya memberikan kebebasan beragama, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam. Dengan semangat ini, Islam dijadikan sebagai dasar konstitusional dan ideologis negara, menjadikannya satu-satunya negara di dunia yang didirikan atas nama Islam secara formal selain Iran dan Arab Saudi.

Konstitusi Pakistan mencerminkan peran dominan Islam dalam berbagai aspek kehidupan negara. Konstitusi tahun 1973, yang masih berlaku hingga sekarang dengan berbagai amandemen, secara resmi menyatakan bahwa "*Islam shall be the State religion of Pakistan*". Konstitusi juga menyebutkan bahwa tidak ada undang-undang yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, syarat untuk menjadi presiden dan perdana menteri adalah seorang muslim, menunjukkan integrasi antara agama dan kualifikasi politik. Untuk memastikan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, Pakistan membentuk lembaga-lembaga seperti *Federal Shariat Court* (FSC) dan *Council of Islamic Ideology* (CII). FSC memiliki wewenang untuk menyatakan batal undang-undang yang bertentangan dengan syariat, sementara CII berperan memberikan rekomendasi kepada parlemen agar hukum-hukum nasional tetap selaras dengan ajaran Islam. Upaya Islamisasi hukum semakin menonjol pada masa pemerintahan Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq (1977–1988), yang menerapkan hukum *Hudud*, ordinansi zakat dan *ushrah*, serta memperkenalkan sistem peradilan yang lebih Islami. Kebijakan-kebijakan ini menciptakan perubahan besar dalam karakter hukum Pakistan, meskipun juga menuai kritik dari berbagai pihak karena dituding digunakan untuk legitimasi kekuasaan militer dan represif terhadap minoritas.

Secara demografis, Islam dipeluk oleh sekitar 97% penduduk Pakistan. Dari jumlah tersebut, sekitar 85% adalah muslim Sunni yang terbagi dalam beberapa mazhab seperti Hanafi (mayoritas), Deobandi, Barelvi, dan Ahl-e-Hadith. Sekitar 10-15% lainnya adalah

muslim Syiah, menjadikan Pakistan sebagai salah satu negara dengan komunitas Syiah terbesar di dunia, setelah Iran dan Irak<sup>21</sup>. Selain itu, terdapat komunitas-komunitas kecil lainnya seperti *Ismailiyah* dan Zikri, serta Ahmadiyah yang telah dinyatakan sebagai non muslim oleh konstitusi Pakistan melalui amandemen kedua pada tahun 1974. Meski demikian, kelompok ini masih mengidentifikasi diri mereka sebagai muslim dan menjadi subjek kontroversi, diskriminasi, bahkan kekerasan. Sektarianisme antara Sunni dan Syiah kerap memicu konflik, terutama di kota-kota besar seperti Karachi, Quetta, dan wilayah Parachinar. Organisasi militan seperti *Lashkar-e-Jhangvi* dan *Sipah-e-Sahaba* pernah menjadi aktor utama dalam kekerasan sektarian, terutama selama dekade 1980-an dan 1990-an. Pemerintah Pakistan dalam beberapa tahun terakhir telah berusaha menindak ekstremisme dan intoleransi dengan membubarkan kelompok-kelompok radikal dan memperkuat regulasi terhadap ujaran kebencian, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan besar<sup>22</sup>.

Dari perspektif sosial budaya, Islam di Pakistan tidak bersifat homogen. Ia merupakan kombinasi antara tradisi Islam *ortodoks*, ajaran tasawuf (*sufisme*), serta unsur lokal dari warisan budaya Asia Selatan. Banyak masyarakat Pakistan yang berafiliasi secara spiritual kepada tarekat-tarekat sufi seperti *Qadiriyyah*, *Naqsyabandiyah*, dan *Chishtiyah*. Tradisi ziarah ke makam para wali, perayaan *Urs (haul)*, dan praktik *Qawwali* masih sangat populer dan dianggap sebagai bagian dari budaya keagamaan. Islam juga meresap dalam praktik-praktik keseharian, seperti aturan berpakaian, norma sosial dalam keluarga, hingga sistem pernikahan. Hukum keluarga di Pakistan, termasuk hukum waris dan perwalian anak, sangat dipengaruhi oleh hukum Islam yang dibedakan menurut mazhab. Dalam aspek politik, partai-partai berbasis Islam seperti *Jamaat-e-Islami* dan *Jamiat Ulema-e-Islam* berperan aktif dalam parlemen dan pemerintahan daerah, meskipun tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas secara nasional. Peran ulama juga signifikan dalam memengaruhi opini publik, terutama dalam isu-isu moral, hukum syariat, dan kebijakan publik terkait agama.

Dalam konteks hubungan internasional, Pakistan sering memosisikan dirinya sebagai negara muslim terdepan dalam isu-isu dunia Islam. Sebagai anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Pakistan kerap menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan mengecam *Islamofobia* global. Pakistan juga menjalin kerja sama erat dengan negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Turki, Iran, dan negara-negara Teluk.

---

<sup>21</sup> Surawardi.

<sup>22</sup> Arikarani, 'Pendidikan Islam Di Mesir, India, Dan Pakistan'.

Selain itu, Pakistan memiliki sejarah panjang dalam mendukung gerakan jihad di Afghanistan selama perang melawan Uni Soviet, yang kemudian melahirkan konsekuensi kompleks berupa munculnya jaringan militan Islam di kawasan, termasuk Taliban. Pada era kontemporer, Pakistan berusaha menyeimbangkan citra sebagai negara Islam dengan komitmen terhadap moderasi, demokrasi, dan kerja sama global dalam menanggulangi *ekstremisme*. Upaya tersebut terlihat dalam kampanye nasional melawan terorisme seperti *Operation Zarb-e-Azb* dan *National Action Plan (NAP)*<sup>23</sup>.

Dengan demikian, Islam di Pakistan tidak hanya merupakan agama mayoritas, tetapi juga menjadi landasan ideologis, simbol nasional, dan pedoman normatif dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Namun, hubungan antara agama dan negara di Pakistan juga bersifat dinamis, penuh ketegangan antara konservatisme dan modernitas, antara inklusivitas dan eksklusivitas, serta antara aspirasi religius dan realitas pluralistik. Pemahaman mendalam terhadap peran Islam di Pakistan sangat penting untuk memahami tidak hanya karakter masyarakat Pakistan, tetapi juga arah perkembangan sosial politik dan posisinya dalam geopolitik dunia Islam.

### 3. Dinamika dan Tantangan Sistem Pendidikan Islam di Pakistan

Sistem pendidikan Islam di Pakistan merupakan cerminan dari perjalanan historis, kultural, dan ideologis bangsa yang dibentuk atas dasar aspirasi Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembentukan moral individu, melainkan juga sebagai medium penguatan identitas kebangsaan dan stabilitas sosial. Pendidikan di Pakistan diawasi oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Pakistan serta pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah federal sebagian besar membantu dalam pengembangan kurikulum, akreditasi dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan<sup>24</sup>.

Adapun, sistem standar nasional pendidikan terinspirasi dari sistem Inggris. Sistem pendidikan di Pakistan umumnya dibagi menjadi lima tingkatan yaitu *primary /primer* (kelas satu sampai lima), *middle/tengah* (kelas enam sampai delapan), *high/menengah* (sembilan dan sepuluh, yang mengarah ke Sekolah Menengah, *Certificate* atau SSC), *intermediate/tinggi* (kelas sebelas dan dua belas, yang mengarah ke *Higher Secondary* (Sekolah) Sertifikat atau HSC), program dan universitas terkemuka sarjana dan gelar sarjana<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Rizal Safarudin et al., 'Pendidikan Islam Di Pakistan Islamic Education in Pakistan', *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): 168–75, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4838>.

<sup>24</sup> Samdani, 'Pendidikan Islam Di Pakistan'.

<sup>25</sup> Surawardi, 'Pendidikan Islam Di Pakistan'.

Sedangkan Pendidikan Islam di Pakistan berkembang dalam kerangka dualisme sistem, yaitu sistem pendidikan formal (yang terintegrasi dalam sekolah-sekolah negeri dan swasta) dan sistem pendidikan tradisional (yang dikelola oleh institusi madrasah). Keduanya berkembang secara paralel namun seringkali tidak saling terhubung secara substansial, baik dari segi kurikulum, metode pengajaran, maupun orientasi hasil pendidikannya<sup>26</sup>.

Dalam sistem pendidikan formal, pendidikan Islam diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran wajib yang dikenal sebagai Islamiyat untuk semua siswa Muslim dari tingkat dasar hingga menengah. Mata pelajaran ini meliputi ajaran dasar Islam, termasuk rukun iman, rukun Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW, pengenalan terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta penanaman nilai-nilai moral dan etika Islam. Pada jenjang pendidikan tinggi, institusi seperti International Islamic University Islamabad (IIUI), Punjab University, dan Karachi University memiliki fakultas studi Islam yang menawarkan program pendidikan sarjana, magister, hingga doktoral. Pendidikan Islam di tingkat universitas lebih bersifat akademik dan kritis, dengan kajian-kajian mendalam terhadap tafsir, hadis, ushul fiqh, sejarah peradaban Islam, dan pemikiran Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan munculnya diskursus ilmiah yang tidak hanya mereproduksi pengetahuan klasik, tetapi juga mengkaji isu-isu modern dalam perspektif Islam<sup>27</sup>.

Di sisi lain, sistem pendidikan Islam tradisional di Pakistan berakar pada warisan panjang madrasah yang telah berkembang sejak masa pra-kolonial. Madrasah memainkan peran sentral dalam mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman klasik, khususnya melalui kurikulum *Dars-e-Nizami* yang dikembangkan pada abad ke-18 oleh Mulla Nizamuddin dari Lucknow. Kurikulum ini mencakup pelajaran gramatika Arab (*nahwu* dan *sharaf*), logika (*mantiq*), tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, serta filsafat. Meski memiliki keunggulan dalam pelestarian ilmu-ilmu klasik, kurikulum ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai kurang relevan dengan kebutuhan zaman modern karena minimnya muatan sains, teknologi, dan keterampilan vokasional. Di Pakistan, madrasah dikelola oleh berbagai federasi yang mewakili aliran-aliran Islam seperti *Deobandi* (*Wafaq-ul-Madaris*), *Barelvi* (*Tanzeem-ul-Madaris*), *Syiah* (*Wafaq-ul-Madaris al-Shia*), *Ahl-e-Hadith* (*Rabta-tul-Madaris*), dan *Jamaat-e-Islami* (*Jamiat-ul-Madaris*). Setiap federasi memiliki otonomi dalam pengelolaan kurikulum, pengujian, dan sertifikasi lulusan<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Muslem, 'Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Di Pakistan'.

<sup>27</sup> Arikarani, 'Pendidikan Islam Di Mesir, India, Dan Pakistan'.

<sup>28</sup> T Rahman, *Denizens of Alien Worlds: A Study of Education, Inequality and Polarization in Pakistan* (Oxford University Press, 2004).

Dalam praktiknya, pendidikan madrasah di Pakistan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama di wilayah pedesaan dan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena madrasah umumnya tidak memungut biaya pendidikan, menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi siswa, serta memberikan iklim religius yang kuat. Namun, tantangan besar dari sistem ini adalah terbatasnya kapasitas madrasah dalam membekali peserta didik dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja kontemporer. Dalam beberapa kasus, madrasah juga menjadi tempat berkembangnya ideologi-ideologi keagamaan yang eksklusif, bahkan sektarian, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan mempersulit integrasi nasional. Oleh karena itu, isu reformasi madrasah telah menjadi agenda penting dalam kebijakan pendidikan Pakistan sejak dua dekade terakhir<sup>29</sup>.

Upaya reformasi pendidikan Islam di Pakistan telah dimulai sejak awal tahun 2000-an, terutama setelah meningkatnya kekhawatiran global terhadap radikalisme pasca peristiwa 11 September 2001. Pemerintah Pakistan meluncurkan berbagai program seperti *Madrasa Reform Project* (MRP) dan *National Education Policy* 2009, yang bertujuan untuk mendorong registrasi madrasah, pengawasan kurikulum, integrasi pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris, serta peningkatan pelatihan guru. Salah satu inisiatif terbaru adalah pengenalan *Single National Curriculum* (SNC) pada tahun 2019, yang bertujuan menyeragamkan standar kurikulum antara sekolah negeri, swasta, dan madrasah. Meskipun ide ini tampak menjanjikan, pelaksanaannya menghadapi banyak tantangan, terutama resistensi dari komunitas ulama yang menilai SNC sebagai bentuk intervensi negara terhadap otonomi lembaga pendidikan Islam. Di samping itu, kelemahan koordinasi antarprovinsi dan minimnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam realisasi reformasi tersebut secara menyeluruh<sup>30</sup>.

Analisis mendalam terhadap sistem pendidikan Islam di Pakistan menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada perbedaan kurikulum atau metode, melainkan juga pada orientasi ideologis dan struktur sosial yang mendasari sistem pendidikan itu sendiri. Dualisme pendidikan menciptakan stratifikasi sosial, di mana lulusan sekolah formal cenderung diterima di pasar kerja dan institusi modern, sedangkan lulusan madrasah sering terpinggirkan dari sektor ekonomi formal dan hanya memiliki akses terbatas pada posisi-posisi keagamaan. Di sisi lain, perlu diakui bahwa madrasah telah berperan besar dalam menjaga kesinambungan ilmu-ilmu keislaman, terutama di

---

<sup>29</sup> Muslem, 'Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Di Pakistan'.

<sup>30</sup> Safarudin et al., 'Pendidikan Islam Di Pakistan Islamic Education in Pakistan'.

tengah keterbatasan peran negara dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas. Oleh karena itu, reformasi pendidikan Islam di Pakistan memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga inklusif dan dialogis, melibatkan para ulama, pendidik, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas<sup>31</sup>.

Dengan demikian, masa depan pendidikan Islam di Pakistan sangat tergantung pada keberhasilan integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern, serta kemampuan negara dalam menjembatani berbagai kepentingan ideologis yang ada. Diperlukan kebijakan yang tidak sekadar menyeragamkan kurikulum, tetapi juga memperkuat kapasitas institusi pendidikan Islam agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga produktif, toleran, dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan Islam yang adaptif dan moderat akan menjadi modal utama bagi Pakistan dalam membangun masyarakat yang inklusif, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

#### **4. Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Pakistan: Perspektif Ideologis, Pragmatis, dan Responsif**

Kebijakan pemerintah Pakistan terhadap pendidikan Islam tidak hanya bersifat normatif sebagai konsekuensi dari status Islam sebagai agama negara, melainkan juga merupakan strategi sosial-politik dalam membentuk identitas nasional, menjaga stabilitas ideologis, serta merespons tekanan domestik dan internasional. Sejak berdirinya negara Pakistan pada tahun 1947, pendidikan Islam telah ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan melalui pengakuan konstitusional terhadap Islam sebagai landasan hukum dan kehidupan publik, sebagaimana termuat dalam Konstitusi 1973 yang menyatakan bahwa "tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan ajaran Islam." Dalam kerangka ini, kebijakan pendidikan Islam pemerintah Pakistan tidak hanya diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai religius pada generasi muda, tetapi juga digunakan untuk melegitimasi kekuasaan negara, membangun kesatuan bangsa yang plural secara etnis dan bahasa, serta merespons dinamika sosial-politik seperti radikalisme dan sektarianisme. Pemerintah memformulasikan kebijakan pendidikan Islam melalui dua jalur utama: integrasi pelajaran Islam dalam sistem pendidikan nasional (sekolah umum) dan pengawasan serta reformasi terhadap sistem pendidikan madrasah tradisional<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Atta, 'Pendidikan Islam Di Pakistan'.

<sup>32</sup> S. V. R. Nasr, *The Islamic State: The Politics of Islam and the Making of State Power in Pakistan* (Oxford University Press, 2005).

Dalam sektor pendidikan umum, kebijakan utama pemerintah adalah menjadikan mata pelajaran Islamiyat sebagai kurikulum wajib bagi semua siswa muslim dari tingkat dasar hingga menengah. Islamiyat tidak hanya mencakup ajaran dasar seperti akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga sejarah Islam, studi Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Konten Islamiyat terus diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan zaman dan menjaga keseimbangan antara ortodoksi dan moderasi. Salah satu kebijakan paling ambisius dalam konteks ini adalah peluncuran *Single National Curriculum* (SNC), yang dimulai pada tahun 2020 sebagai upaya besar pemerintah untuk menyeragamkan kurikulum antara sekolah negeri, swasta, dan madrasah. SNC bertujuan untuk menghilangkan fragmentasi sistem pendidikan dan memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh pendidikan Islam yang seragam dan sesuai dengan prinsip inklusif, moderat, serta patriotik. SNC juga mencerminkan semangat Islamisasi pendidikan ala *Zia-ul-Haq* pada era 1980-an, namun dikemas dalam narasi reformasi dan modernisasi yang lebih sesuai dengan wacana kontemporer<sup>33</sup>.

Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan intensif terhadap reformasi sistem madrasah, yang merupakan bentuk pendidikan Islam tradisional paling dominan di Pakistan. Jumlah madrasah di Pakistan diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 lembaga, tersebar di seluruh wilayah negara, dengan jutaan peserta didik yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah melihat madrasah sebagai kekuatan pendidikan penting, namun sekaligus sebagai tantangan karena beberapa di antaranya dicurigai menjadi tempat berkembangnya paham sektarianisme dan radikalisme. Oleh sebab itu, sejak awal 2000-an, pemerintah Pakistan didorong oleh tekanan internasional, khususnya pasca peristiwa 11 September 2001 menerapkan kebijakan reformasi madrasah yang bertujuan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan identitas keagamaannya. Kebijakan ini mencakup pendataan dan registrasi madrasah secara nasional, pengenalan mata pelajaran umum (sains, matematika, bahasa Inggris), peningkatan pelatihan guru, serta pembentukan lembaga pengatur khusus, seperti *Directorate General of Religious Education* (DGRE) pada tahun 2019<sup>34</sup>.

Namun, kebijakan reformasi ini menghadapi resistensi yang cukup besar dari jaringan federasi madrasah yang memiliki otonomi tinggi, seperti *Wafaq-ul-Madaris Al-*

---

<sup>33</sup> Muhammad Ruslan, 'Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan' (PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2012).

<sup>34</sup> Samdani, 'Pendidikan Islam Di Pakistan'.

*Arabia (Deobandi), Tanzeem-ul-Madaris Ahle Sunnat (Barelvi), Rabta-tul-Madaris (Ahl-e-Hadith), dan Wafaq-ul-Madaris Al-Shia.* Federasi-federasi ini menilai intervensi pemerintah sebagai bentuk kontrol terhadap kebebasan beragama dan kemandirian keilmuan mereka. Selain itu, resistensi juga muncul dari fakta bahwa pemerintah belum mampu menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung reformasi struktural madrasah, terutama dalam hal infrastruktur, pelatihan guru, dan pembaruan materi ajar. Dalam beberapa kasus, reformasi ini bahkan menimbulkan ketegangan politik antara kelompok ulama dan pemerintah, serta memperluas jurang antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan formal yang telah lebih dahulu mengadopsi pendekatan modern dan rasional.

Secara analitis, kebijakan pemerintah Pakistan terhadap pendidikan Islam dapat dilihat dalam tiga spektrum yaitu *ideologis, pragmatis, dan responsif*. Secara ideologis, kebijakan ini merupakan manifestasi dari cita-cita Pakistan sebagai "negara bangsa Islam," sebuah narasi yang selalu digunakan untuk menjaga legitimasi negara di tengah pluralitas sosial. Secara pragmatis, pendidikan Islam juga menjadi alat untuk mengatasi masalah buta huruf, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses pendidikan, karena madrasah telah lama menyediakan layanan pendidikan gratis kepada kelompok miskin. Sementara itu, secara responsif, kebijakan ini seringkali bersifat reaktif terhadap isu-isu keamanan nasional dan tekanan internasional, terutama dalam konteks pemberantasan ekstremisme. Konsekuensinya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat tambal sulam dan kurang menyentuh akar masalah, seperti ketimpangan epistemologis antara ilmu agama dan ilmu sekuler, serta dualisme sistem pendidikan yang terus berlangsung hingga hari ini<sup>35</sup>.

Kritik yang berkembang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah seringkali gagal menciptakan integrasi substantif antara pendidikan Islam dan pembangunan nasional. Pendidikan Islam masih diperlakukan sebagai entitas terpisah dari pembangunan ekonomi dan sains-teknologi, sehingga para lulusan madrasah kurang mampu bersaing dalam pasar kerja modern. Di sisi lain, kebijakan Islamisasi kurikulum di sekolah umum belum sepenuhnya menjawab tantangan radikalisisasi, karena pendekatannya cenderung normatif dan kurang kontekstual. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pendidikan Islam di Pakistan membutuhkan strategi yang lebih inklusif dan multidimensi, yang tidak hanya memperhatikan aspek kurikulum dan kelembagaan, tetapi juga memperkuat dialog antarmazhab, meningkatkan literasi keagamaan yang toleran,

---

<sup>35</sup> Nasr, *The Islamic State: The Politics of Islam and the Making of State Power in Pakistan*.

dan membuka ruang integrasi ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam. Pemerintah juga harus mampu membangun kemitraan strategis dengan ulama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Pakistan terhadap pendidikan Islam menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, kebijakan tersebut mencerminkan upaya serius negara untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernitas dan integrasi sosial; namun di sisi lain, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, ideologis, dan kultural. Dibutuhkan kesungguhan politik (*political will*), keberanian untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan, serta visi jangka panjang yang mampu mengintegrasikan keunggulan sistem madrasah dengan kebutuhan pendidikan nasional. Jika tidak, pendidikan Islam di Pakistan akan terus berada dalam ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara kontrol negara dan otonomi keagamaan, serta antara idealisme keislaman dan realitas sosial yang terus berubah.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam di Pakistan mencerminkan dualisme struktural antara pendidikan formal yang terintegrasi dalam sistem nasional dan pendidikan tradisional berbasis madrasah. Keduanya berakar pada ideologi negara yang menjadikan Islam sebagai fondasi konstitusional, namun masih menghadapi kendala serius dalam integrasi kurikulum, relevansi dengan tuntutan kontemporer, dan keterhubungan dengan pembangunan sosial-ekonomi. Reformasi melalui *Single National Curriculum (SNC)* dan regulasi madrasah menandai upaya penting, tetapi belum menyentuh persoalan mendasar akibat hambatan struktural, resistensi ideologis federasi madrasah, serta minimnya pendekatan partisipatif. Pendidikan Islam di Pakistan hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional dan masih mempertahankan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang holistik dan transformatif dengan melibatkan pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil, guna mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi abad ke-21. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah secara langsung persepsi peserta didik, pendidik, dan pengelola madrasah terhadap implementasi reformasi, mengkaji model integratif yang berhasil di negara Muslim lain, serta mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam modernisasi pendidikan Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan memperkuat perumusan kebijakan yang responsif, kontekstual, dan berkelanjutan.

## Referensi

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka'. *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Arikarani, Yesi. 'Pendidikan Islam Di Mesir, India, Dan Pakistan'. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2019): 87–112. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.76>.
- Atta, Nashruddin. 'Pendidikan Islam Di Pakistan: Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia'. *FIKRUNA* 3, no. 2 (2021): 75–87.
- Darmawan, Budi, and Endah Regita Cahyani Nazra. 'Lahirnya Pakistan: Perjuangan Muslim India Dan Tantangan Pembangunan Bangsa'. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 18, no. 2 (2024): 242–59.
- Lubis, Nurul Widiyah, and Rindi Antika Sari Saragih. 'Sistem Pendidikan Negara-Negara Di Asia (India, Pakistan, Bangladesh, Dan Maroko)'. *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023): 119–25.
- Lubis, Rusdi Hamka. 'Critic: Poverty in Indonesia and the Solution of Islam in the Welfare of the People's Economy'. *Academia Edu*, 2020.
- Muslem, Muslem. 'Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Di Pakistan'. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2019).
- Nasr, S. V. R. *The Islamic State: The Politics of Islam and the Making of State Power in Pakistan*. Oxford University Press, 2005.
- 'Pakistan'. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 13 January 2025.
- Rahman, T. *Denizens of Alien Worlds: A Study of Education, Inequality and Polarization in Pakistan*. Oxford University Press, 2004.
- Rozali, Yuli Asmi. 'Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik'. In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19:68, 2022.
- Ruslan, Muhammad. 'Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan'. PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2012.
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati. 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif'. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (24 December 2022): 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna, Masrur Lubis, Suprizen, Zulmuqim, and M Zalnur. 'Pendidikan Islam Di Pakistan Islamic Education in Pakistan'. *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): 168–75. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4838>.
- Samdani, Samdani. 'Pendidikan Islam Di Pakistan'. *Educational Journal: General and Specific Research* 1, no. 1 (2021): 1–14.
- . 'Perkembangan Dan Pendidikan Islam Di Pakistan'. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2021): 44–57.

- Sassi, Komarudin. 'Wawasan Politik-Ideologis Pendidikan Islam Di Pakistan Dan Iran: Integrasi Doktrin Sunni-Syi'ah'. *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 3, no. 01 (2025): 468–80.
- Subagiya, Bahrum. 'Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis'. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 304–18.
- Surawardi, Surawardi. 'Pendidikan Islam Di Pakistan'. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015).
- Syahroni, Muhammad Irfan. 'Prosedur Penelitian Kuantitatif'. *EJurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (2022): 43–56.
- Tsauri, Tadzkira Nadiya. 'Pengaruh Pemikiran Muhammad Asad Dalam Pembentukan Negara Islam: Studi Tentang Terbentuknya Negara Pakistan'. B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- United Nations. *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. UN DESA/POP/2024/TR/NO. 9. New York: United Nations Publication, 2024.